

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap riset terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari riset terdahulu. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Pertama Sakaria, “Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Pekkabata Terhadap Konsumen (Perspektif Etika Bisnis Islam).”¹Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama pemahaman pedagang buah-buahan di pasar Pekkabata mengenai etika bisnis islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama islam. Kedua perilaku pedagang buah-buahan di pasar Pekkabata tidak sesuai dengan etika bisnis islam, yang meliputi, tidak melupakan ibadah shalat wajib, bersedekah, adil dan seimbang dalam menimbang atau menakar, tidak menyembunyikan cacat, tidak memaksa pembeli, bertanggung jawab atas kualitas barang dan ramah dalam melayani pembeli. Persamaan antara skripsi Sakaria dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan pedagang yang ada di Pasar tentang bertransaksi sesuai

¹ Sakaria, “ Perilaku Pedagang Buah-Buahan di Pasar Pekkabata Terhadap Konsumen (Perspektif Etika Bisnis Syariah)”, (Skripsi ; Fakultas Syariah Dan Hukum Syariah : IAIN Parepare 2020).

ajaran agama Islam. Adapun perbedaannya yaitu Sakaria pembahasan skripsi lebih mengarah pada kajian perilaku pedangan buah-buahan di pasar Pekkabate terhadap konsumen menurut etika bisnis islam. Sedangkan penulis lebih fokus kepada dimana para pedagang terkhusus pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Pinrang harus berdagang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Kedua, Zulham Aprizal, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Desa Pulau Palas”.² Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang sembako di Pasar Desa Pulau Palas dalam melakukan Etika komunikasi bisnisnya sudah melakukan dengan baik. Dengan hasil, mencapai angka 71.18% dan dikategorikan baik, karena terletak pada 61%-80%. Dan faktor yang mempengaruhi etika bisnis islam pada pedagang sembako di Pasar Desa Pulau Palas adalah. Faktor penghambat, karena faktor pendidikan, dan faktor usia yang masih muda. Faktor pendukung adalah bersikap ramah pada setiap konsumen, sopan dalam melayani konsumen yang datang, dan tidak membeda-bedakan harga antar pembeli yang datang. Persamaan skripsi Zulhan Aprizal dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan pedagang yang ada di Pasar tentang bertransaksi sesuai ajaran agama islam. Adapun perbedaannya yaitu Zulhan Aprizal lebih menekankan pada pelaksanaan etika komunikasi Bisnis islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis islam pada pedagang sembako di Pasar Desa Pulau Palas, Sedangkan penulis lebih fokus kepada di mana para pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Pinrang harus berdagang sesuai dengan aturan yang harus ditaati sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

² Zulham Aprizal, “Penerapan Etika Bisnis Syariah Pada Pedagang Sembako di Pasar Desa Pulau Palas”, (Skripsi ; Staiauliurasyidin Tembilahan, 2020).

Ketiga, Madiana, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Pasar Pannampu Kota Makassar”.³ Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di unit pasar Pannampu mengenai etika bisnis islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis islam, akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama islam dan Perilaku pedagang di unit pasar Pannampu dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis islam yang diwujudkan para pedagang Persamaan skripsi Madiana dan penulis yaitu sama-sama ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan pedagang yang ada di Pasar tentang bertransaksi sesuai ajaran agama islam. Adapun perbedaannya yaitu Madiana membahas mengenai Perilaku pedagang di unit pasar Pannampu dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam yang diwujudkan para pedagang. Sedangkan penulis lebih fokus kepada dimana para pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Pinrang harus berdagang sesuai dengan aturan nilai-nilai ekonomi syariah.

Karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, terdapat relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun berbagai tulisan tersebut memiliki ciri khas dan fokus masing-masing yang berbeda dengan penelitian ini. peneliti secara signifikan lebih menfokuskan pada pengemplementasian nilai nilai ekonomi syariah terhadap perilaku pedagang di pasar sentral Pinrang terkhusus kepada pedagang sembako baik dalam segi timbangan maupun dalam segi pelayanan.

³ Madiana, “Implementasi Etika Bisnis Syariah Pada Pedagang di Pasar Pannampu Kota Makassar”, (skripsi ; Universitas Muhammadiyah Makassar,2019).

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Afan Gaffar, implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁴

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.⁵

Menurut Oktasari, Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

⁴Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat pengkajian Etika dan Pemerintahan, 2009), h. 295.

⁵Iwan Apriandi, "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Syariah Di Kota Langsa", 2015, h. 11–35.

Meter dan Horn, menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Di mana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Menurut Horn, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan,
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana,
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan,

- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.⁶

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti berpendapat Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, bahwa Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁸ Mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Implementasi secara lebih spesifik, yaitu: *those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth' in the prior policy decisions*. Artinya: tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹

Upaya untuk memahami implementasi secara baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama, memahami implementasi

⁶ Mulyadi, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.12.

⁷ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, Ed. IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.529.

⁹ Erwan Agus Purwanto dan Diah Ratih Sulis, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h.20.

sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Pendekatan kedua, implementasi dilihat sebagai suatu bidang kajian (*field of study*). Implementasi sebagai suatu studi memiliki berbagai elemen penting, yaitu: *subject matter (ontologi)*, cara memahami objek yang dipelajari (*epistemologi*), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (*aksiologi*).¹⁰

b. Faktor Mempengaruhi Implementasi

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan

¹⁰Erwan Agus Purwanto dan Diyah Ratih Sulis, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, h.21-23.

telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.¹¹

- 2) Sumber daya, Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino).¹² Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan *skill*/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program

¹¹ Aris kurniawan, *Pengertian Implementasi*, [https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-
implementasi/](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implementasi/), (28 februari 2021).

¹² Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.49.

ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kebutuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.¹³

- 3) Disposisi atau sikap, Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi. pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi *insentif* oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.¹⁴
- 4) Struktur birokrasi, Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang

¹³ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 143.

¹⁴ Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.¹⁵

c. Tujuan Implementasi

- 1) Mengukur Pengaruh dari Program. Tujuan utama implementasi untuk mengetahui apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi pada suatu program yang sudah berjalan. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan sebuah program, beberapa aspek perlu dipantau secara maksimal seperti rancangan program, pengaturan administrasi, layanan, sumber pelaksana dan hasil.¹⁶
- 2) Tindak Lanjut Evaluasi. Setelah menjalankan program, diperlukan analisis yang disebut evaluasi tentang sejauh mana program dapat berjalan. Dengan adanya evaluasi, data untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang baru. Jika hasil dari evaluasi tidak ditindak lanjuti dalam bentuk aksi yang sesuai, maka mustahil mewujudkan perbaikan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

¹⁵ Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), h. 4.

¹⁶ Alan Werner, *A Guide to Impelementation Research*, (Washington: The Urban Institute Press, 2004), h. 2.

Implementasi mewujudkan hasil evaluasi dalam bentuk program-program baru sesuai kebutuhan.¹⁷

- 3) Menjalankan Program-Program yang Direncanakan Program yang sudah direncanakan perlu segera dieksekusi, agar tujuan bisa tercapai. Selain itu perlu adanya pengawasan sehingga program berjalan sesuai dengan harapan. Untuk meminimalisir kendala dan agar program bisa terjadwal dengan baik.
- 4) Menyelesaikan Rancangan Sistem yang Disepakati Setelah program telah berjalan dengan baik, perlu kiranya terus mengawasi dan melaksanakan program sampai batas waktu yang ditentukan agar terlihat hasil yang diharapkan serta kemanfaatan dari program.¹⁸

2. Ekonomi Syariah

Kata ekonomi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedangkan kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.

Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Syariah.¹⁹ Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Syariah. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Syariah ke dalam tiga kemungkinan pemakaian,

¹⁷ Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation*, (California: University Of California Press, 1984), h. xvi.

¹⁸ Anita M. Pankake, *Implementation: Making Things Happen*, (New York: Routledge, 2013), h. 102.

¹⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

pertama, yang dimaksud ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Syariah. Kedua yang dimaksud ekonomi Syariah adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan ketiga adalah ekonomi Syariah dalam pengertian perekonomian umat Syariah. Dalam tulisan ini ekonomi Syariah menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Syariah sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Syariah merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Syariah yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syari'ah dalam bidang ekonomi.²⁰

a. Ciri Sistem Ekonomi Syariah

- 1) *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan

²⁰ M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1-2.

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.

- 2) *Freedom to Act* (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwah, adil, dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.
- 3) *Social Justice* (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan *ma'ad*. Dalam Syariah, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.²¹

b. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*). Adapun nilai-nilai dasar ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:

- 1) Nilai Kepemilikan Konsep kepemilikan dalam Syariah tidak sama konsep kepemilikan dalam faham *liberalisme-kapitalisme* maupun *sosialisme*. Dalam faham *liberalisme-kapitalisme*, seperti yang dikemukakan John Lock "Setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya". Jadi dengan demikian konsep kepemilikan dalam faham *liberalisme-kapitalisme* adalah konsep bersifat absolut. Di dalam faham *sosialisme* adalah sebaliknya, seseorang tidak di perkenankan

²¹ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 48

untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi. Terus bagaimana halnya dengan konsep kepemilikan dalam Syariah? Tuhan telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah Swt. QS.Al-Baqarah/2 : 107.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ - ١٠٧

Terjemahnya :

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.²²

Menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Syariah adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya.

Pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang dimanfaatkan Allah padanya akan kehilangan terhadap pemilikan lahan atau tanah. Hadist Nabi Muhammad saw.

Artinya :

Barangsiapa menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu akan menjadi miliknya. Dan, tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya dengan tembok setelah tiga tahun.²³

- 2) Nilai Keadilan. Keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna

²² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 17.

²³ Adi sasono, Solusi Syariah atas problematika umat : ekonomi, pendidikan, dan dakwah, (jakarta : gema insani press, 1998), h.40.

kebijaksanaan (*al-hikmah*) , keberanian (*al-siyasiyah*) , dan keterpeliharaan (*aliffah*). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karna menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemamam puan serta bawaan yang sama. Aristoteles mendefinisikan keadilan adalah nilai keutamaan, bukankeutamaan yang mandul dan bukan pula semata mata bersifat individual keadilan harus mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain . Oleh karna itu keadilan menurutnya adalah berisi suatu unsur kesamaan dan menuntut bahwa benda -benda yang ada di dunia ini di bagi secara rata yang pelaksanaannya di kontrol oleh hukum. Dalam sistem *liberalisme-kapita-lisme* sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi di katakan adil bila mana pemerintah tidak ikut campur tangan di dalamnya dan di serahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Bagaimana konsep keadilan dalam syariah? Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam al-quran sekurang kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Syariah menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Firman Allah dalam QS.An-Nahl/16 : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٩٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁴

Syariah sangat menekankan arti pentingnya kita mem-perhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya , h. 277.

kita sendiri. Syariah juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi, tetapi pengertian keadilan dalam Syariah tidaklah bermakna bahwa syariah menghendaki di jalankannya prinsip sama rata atau per-samaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah di ciptakan oleh Allah, memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuanlainnya.

- 3) Nilai Keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana Allah menyebutnya dalam QS. Al-Baqarah/2 : 201.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ – ٢٠١

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:”Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”²⁵

Bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan, tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 31.

- 4) Nilai Kebebasan, Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentralistis. Sedangkan dalam sistem ekonomi *liberalisme, kapitalisme* masalah kebebasan orang per orang sangat mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan negara tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka termasuk dalam bidang ekonominya. Di dalam sistem ekonomi Syariah. Dalam Syariah masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam dalam struktur pasar Syariah. Kebebasan di dasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Syariah atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.
- 5) Nilai Kebersamaan, Dalam sistem ekonomi *liberalisme-kapitalisme* lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebihan. dalam asumsi mereka bila setiap individu sudah sejahtera maka masyarakatnya otomatis akan sejahtera. Pendapat itu berdasarkan dari pemikiran “Adam Smith” yang menyatakan :“Terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan public.”

Sistem ekonomi sosialisme. Sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi *individualisme* atau pribadi. Dan akibatnya orang perorang tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Dalam sistem ekonomi Syariah adalah perinsip tauhid yang di bawa Syariah yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia

adalah bersumber dari satu yaitu : Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Syariah tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa syariah telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam syariah manusia sama di depan tuhan. Jadi, arti demokrasi di dalam syariah tidaklah hanya bernuansa *insaninyah* (kemanusiaan) tetapi juga bernuansa *ilahiyyah* (ketuhanan).

3. Perilaku Pedagang

a. Pengertian Perilaku Pedagang

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.²⁶

Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Soekidjo Notoatmojo perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar (*stimulus*). Perilaku dapat dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Perilaku tertutup (*covert behaviour*), perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum bisa diamati oranglain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk

²⁶ Zakiyah dan Bintang Wirawan, "Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung", (Jurnal Sociologie, Vol. 1), h . 331.

“*unobservabel behavior* “ atau “*covert behavior*” apabila respons tersebut terjadi dalam diri sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang lain) yang disebut dengan pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*).

- 2) Perilaku Terbuka (*Overt behaviour*), apabila respons tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang disebut praktek (*practice*) yang diamati orang lain dari luar atau “*observabel behavior*”.

Perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” (*Stimulus-Organisme-Respons*). Berdasarkan batasan dari Skinner tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa perilaku adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka pemenuhan keinginan, kehendak, kebutuhan, nafsu, dan sebagainya. Kegiatan ini mencakup :

- a) Kegiatan kognitif: pengamatan, perhatian, berfikir yang disebut Pengetahuan
- b) Kegiatan emosi: merasakan, menilai yang disebut sikap (*afeksi*)
- c) Kegiatan konasi: keinginan, kehendak yang disebut tindakan (*practice*)

Menurut Soekidjo Notoatmojo perilaku adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Dan pendapat di atas disimpulkan bahwa perilaku (aktivitas) yang ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari adanya rangsang yang mengenai individu tersebut.

Menurut Soekidjo Notoatmojo perilaku dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Perilaku pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan yang tidak secara langsung dapat terlihat orang

lain.(tanpa tindakan: berfikir, berpendapat, bersikap) artinya seseorang yang memiliki pengetahuan positif untuk mendukung hidup sehat tetapi ia belum melakukannya secara kongkrit.

- b) Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung(melakukan tindakan), misalnya: seseorang yang tahu bahwa menjaga kebersihan amat penting bagi kesehatannya ia sendiri melaksanakan dengan baik serta dapat menganjurkan pada orang lain untuk berbuat serupa.

Kehidupan sehari-hari istilah perilaku disamakan dengan tingkah laku. Menurut Koentjaraningrat dikutip oleh Rokhmad Prastowo yang dimaksud tingkah laku adalah perilaku manusia yang prosesnya tidak terencana dalam genya atau yang tidak timbul secara naluri saja, tetapi sebagai suatu hal yang harus dijadikan milik dirinya dengan belajar.²⁷

Menurut Moefad perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari diri dalam diri seseorang itu sendiri. Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang. Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak

²⁷ Rokhmad Prastowo, "Karakteristik Sosial Ekonomi dan Perilaku Kerja Perempuan Pedagang Asongan", (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Sebelas Maret, 2008), h. 30.

sesuai sikap objek. perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.

Perilaku dalam penelitian ini adalah segala tingkah laku yang diterapkan oleh pedagang di pasar tradisional yang menjalankan aktivitas berdagang. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan .

Pedagang dapat dikategorikan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Pedagang besar/distributor/agen tunggal Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.
 - b) Pedagang menengah/agen/grosir Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
 - c) Pedagang eceran/pengecer Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.²⁸
- b. Indikator Yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang

Ada beberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang yang diantaranya ialah:

²⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S. Kansil, *Pokok pokok Pngetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.15.

- 1) Takaran Timbangan, Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.²⁹
- 2) Kualitas barang/produk, Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.³⁰
- 3) Keramahan, secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.³¹
- 4) Penepatan Janji, Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya kepada pembeli apabila pedagang mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi

²⁹Sopnar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), h. 23.

³⁰Nirma Kurriawati, “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Konsumen”, Jurnal (Bangkalan: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo, 2015), h. 48.

³¹Zaim Uchrowi, *Karakter Pancasila Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat*, (Jakarta: Balai Pustaka (Persero), 2012), h. 68.

janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak *over-promised under-delivered* terhadap janji-janjinya.³²

- 5) Pelayanan, Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.
- 6) Empati Pada Pelanggan, yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.
- 7) Persaingan Sesama Pedagang, Persaingan bisnis adalah persetujuan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan.
- 8) Pembukuan transaksi, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

³² Jenu Widjadja Tandjung, *Spiritual Selling How To Get And Keep Your Customers*, (Jakarta :Elex Media Komputindo,2008),h. 44.

laporan keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.³³

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Syariah secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Selanjutnya komoditas yang diperjual belikan adalah barang yang baik dan halal. Allah swt memerintahkan hambanya agar senantiasa mengkonsumsi, memproduksi dan mendistribusikan serta bertransaksi barang-barang dagangan yang halal lagi baik sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ – ١٦٨

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.³⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah saw untuk digunakan dan melayani manusia, namun bukan berarti kita bebas tanpa batas melanggar larangannya, karena selain dari pada perintah untuk taat terdapat pula perintah larangan terutama yang berkaitan dengan bisnis perdagangan yaitu Larangan memakan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi dan sebagainya tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai komoditas bisnis, barang-barang ini di haramkan.

³³ Waluyo, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) , h. 5.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 173.

³⁵ Kementerian Agama RI, h. 25.

- 2) Bersikap benar, amanah, dan jujur. Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain.

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli sebagaimana Rasulullah saw, bersabda

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ:

Artinya :

Pebisnis yang jujur dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (*siddiqin*), dan para *syuhada* (pada hari kiamat).³⁶

- 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai'y gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

³⁶ Al-Turmuzi, "unan Al-Turmuzi" (juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1400 H), juz 2, h. 1209.

- 4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad saw. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak mengusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.
- 5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan. Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Syariah sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

Berpegang pada prinsip Perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dollar lewat perdagangan

dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengannya ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasn skripsi ini.

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁷ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

2. Perilaku Pedagang

Secara umum Perilaku dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pertanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, sedangkan pedagang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. ³⁸Peneliti yang di maksud perilaku dalam penelitian ini

³⁷ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)", <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

³⁸ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)", <https://kbbi.web.id/perilakupedagang>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021.

adalah sikap atau perbuatan pedagang di pasar sentral Pinrang dalam memproduksi dan mendistribusikan, atau memasarkan barang dagangannya sesuai dengan nilai ekonomi syariah. Sedangkan, Pedagang adalah orang yang berdagang atau juga bisa disebut saudagar jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya sebagai mata pencaharian mereka.

3. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah

Nilai dasar ekonomi Syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Syariah. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan mengakses kepada aturan *Ilahiyah* (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Dapat diuraikan sebagai berikut yaitu, nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan nilai kebebasan, dan nilai kebersamaan.

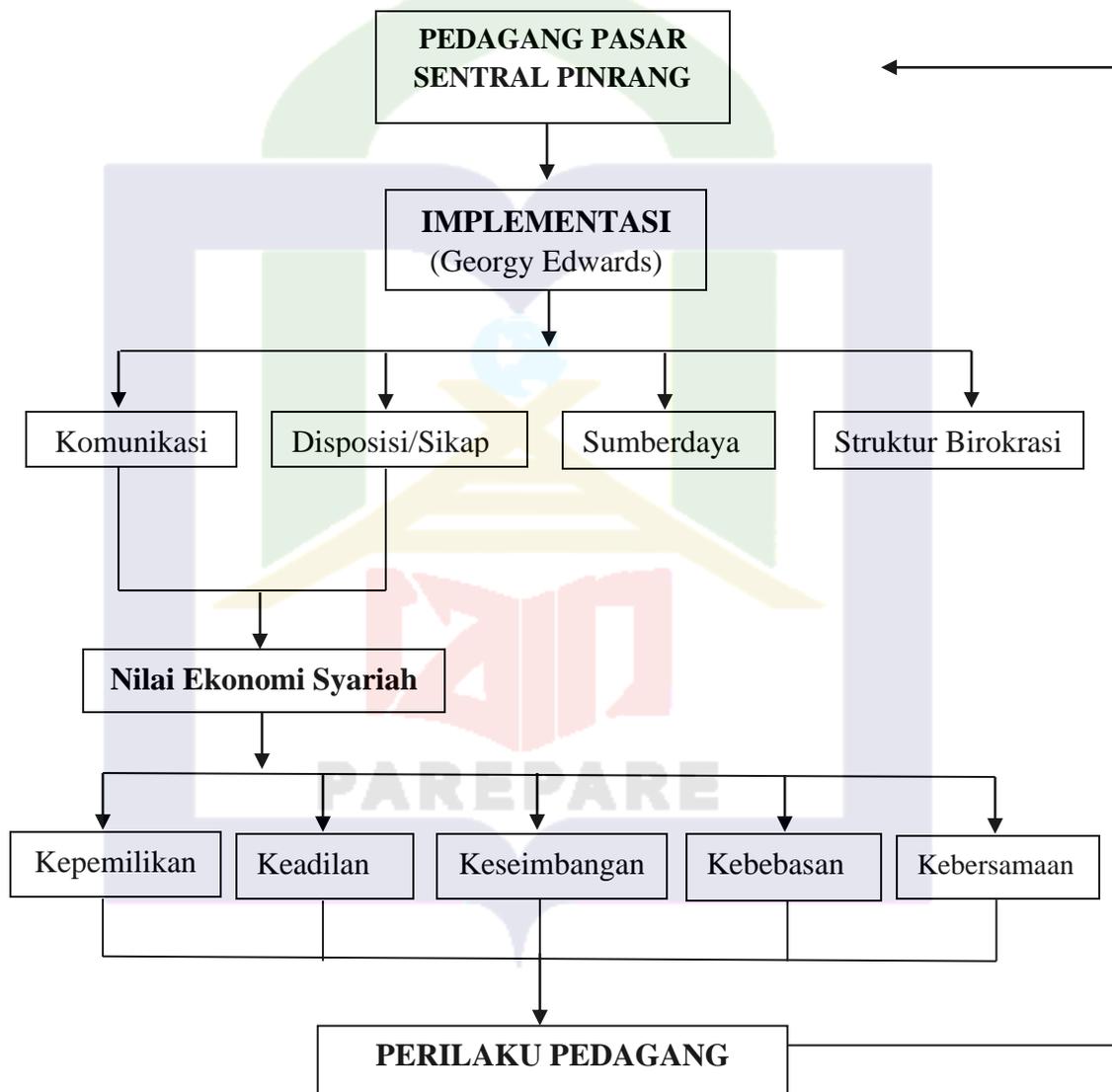
D. Kerangka Pikir

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Pada kerangka berfikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek kerangka berfikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, akan diteliti mengenai bagaimana pemahaman pedagang sembako di pasar sentral pinrang tentang nilai nilai ekonomi syariah.

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pedagang sembako di pasar sentral pinrang tentang nilai-nilai ekonomi syariah. Maka dari itu, peneliti merumuskan kerangka fikir berikut ini yang menggambarkan fokus penelitian dan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Berikut bagan kerangka pikir yang peneliti digunakan.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan gambaran kerangka pikir di atas, penelitian ini memberikan gambaran umum tentang pemahaman pedagang sembako di pasar sentral pinrang tentang nilai-nilai ekonomi Syariah dengan menggunakan teori implementasi dari Georgy Edwards dengan indikator Komunikasi, Disposisi/Sikap, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi, tetapi untuk mengetahui nilai nilai ekonomi syariah terhadap perilaku pedagang sembako di pasar sentral pinrang, indikator yang saya gunakan hanya komunikasi dengan disposisi/sikap.



